

**KESTABILAN PERJANJIAN DAMAI “GOOD FRIDAY AGREEMENT” ATAU
“BELFAST AGREEMENT” SEBAGAI PERJANJIAN DAMAI KONFLIK IRLANDIA
UTARA TAHUN 1998-2016**

***Stability of Peace Agreement “Good Friday Agreement” or “Belfast Agreement” as Northern
Ireland Conflict Peace Agreement in 1998-2016***

ABSTRACT

Conflict is human-being to survive. There are many conflicts ensue in this world for many years. Some of them are running and others had ended up with peace agreement, such as ethnic conflict in Northern Ireland between (Christian Protestant) Unionist and (Catholic) Republican. This Conflict involve England and Republic of Ireland. In peace process, there are three main agreement that achieved but failed to implemented. Remain one agreement that can accommodate all of interest and hold out until now, that called Good Friday Agreement or Belfst Agreement. The stability of this agreement due to the people interests and values are accommodated by reconciliation. Good Friday Agreement content is included the consociational that relate dispute territory, host-state, kin-state, and international context to hold the stability of peace in Northern Ireland.

Keywords: ethnic conflict, Northern Ireland, Republic of Ireland, United Kingdom, Unionist, Republican, accommodate, consociational

Irlandia Utara, adalah salah satu negara konstituen atau bagian dari negara resmi negara kerajaan Britania Raya. Irlandia Utara terletak di timur-laut Pulau Irlandia dan berbatasan dengan *Republic of Ireland* di selatan dan barat. Lembaga sensus Irlandia Utara atau *Northern Ireland Statistic And Research Agency* (NISRA) yang melakukan sensus setiap 10 tahun sekali, menerbitkan statistik peta religi di Irlandia Utara pada Maret tahun 2011. Dari data tersebut, sebanyak 42% warga Irlandia Utara adalah penganut Kristen Protestan dan pemeluk agama kristen lain. Agama terbesar kedua yang dipeluk sebanyak 41% adalah Katolik Roma. Tren yang

terjadi pada tahun 2011 menunjukkan bahwa sebesar 17% penduduk Irlandia Utara memilih untuk tidak menganut agama manapun, dan sisanya yakni sebanyak 0,8% memilih memeluk agama dan kepercayaan lain. (Census , 2011)

Dominasi protestan di Irlandia Utara mempengaruhi peta politik di Irlandia Utara bahkan di awal berdirinya kedaulatan negara ini. Kelompok protestan mendesak membagi dua wilayah Irlandia yakni Irlandia bagian Utara dan Irlandia bagian selatan dan barat. Desakan tersebut menghasilkan sebuah undang-undang yang menandai legalitas kedaulatan Irlandia yang bergabung dengan perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara (*The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland*) yakni *Government Of Ireland Act* yang di sepakati tanggal 23 Desember 1920. (The Constitution of Northern Ireland being the Government of Ireland Act 1920, 1956)

Dalam perjanjian ini, diputuskan juga bahwa Irlandia bagian selatan dan barat resmi berdiri sendiri dan menjadi *Republic of Ireland*. Namun, tidak seluruhnya penduduk Irlandia Utara bersedia bergabung dengan Kerajaan Britania Raya. Sebagian dari mereka menginginkan bergabung dengan *Republic of Ireland* karena merasa memiliki identitas yang sama. Komunitas yang menuntut untuk bergabung dengan *Republic of Ireland* adalah Katolik Roma yang merupakan komunitas agama terbesar kedua di Irlandia Utara. Kelompok katolik roma ini kemudian dituduh sebagai Republikan, sebab kelompok yang sebagian besar merupakan etnis *Irish-Scotland* ini menginginkan Irlandia Utara bergabung dengan Republik Irlandia karena mereka memandang diri mereka sebagai *Irish* (orang Irlandia), bukan *Anglo* (orang Inggris). Katolik Roma juga menunjuk pemerintah Irlandia Utara hanya didominasi oleh para pemeluk Kristen Protestan atau yang disebut dengan Unionis. Para unionis yang merupakan turunan etnis *Anglo-Ireland*, menginginkan Irlandia Utara tetap bergabung dengan kerajaan Britania Raya

Cara Republikan untuk memenuhi kebutuhan politiknya dilakukan dengan cara membentuk organisasi militer bernama *Ireland Republican Army* yang lebih dikenal dengan sebutan IRA. Cara koersif yang digunakan IRA membuat mereka dituding sebagai teroris oleh para Unionis dan Inggris. Dari sinilah konflik *The Troubles* dimulai. Istilah *The Troubles* dijulukan pada IRA karena mereka merusak keamanan dan kestabilan politik Irlandia Utara saat itu.

Akar dari konflik *The Troubles* dimulai pada tahun 1966 ketika para Unionis merayakan 50 tahun Pertempuran Somme, kemenangan besar untuk Kerajaan Inggris di Perang Dunia Pertama. Sementara masyarakat Republikan merayakan Pemberontakan Paskah (*Easter Rising*), di mana sekelompok pejuang Irlandia bertempur dengan tentara Inggris di kota Dublin, yang juga terjadi pada tahun 1916. Para Unionis menganggap bahwa IRA mulai bangkit karena perayaan pemberontakan tersebut dan mendirikan *Ulster Volunteer Force* (UVF) yang merupakan suatu kelompok paramiliter. Pada tahun 1966, kekacauan terjadi ketika anggota UVF membunuh dua orang Katolik dan seorang Protestan. Tiga tahun kemudian, pada bulan Agustus 1969, masyarakat kota Derry (suatu kota Republikan) yang berada di dekat perbatasan dengan Republik Irlandia bentrok dengan polisi dalam protes terhadap sekelompok Protestan yang ingin melakukan pawai pro-Kerajaan di Derry. Huru-hara yang mengikuti bentrokan antara warga Derry dan polisi selama dua hari merupakan awal dari periode yang disebut sebagai *The Troubles* yang akan berlangsung hingga 1998.

Dalam konflik *The Troubles*, Inggris membantu pemerintah Irlandia yang saat itu di dominasi oleh Unionis. Inggris mengirimkan tentara ke Belfast dan perbatasan Irlandia Utara dan *Republic of Ireland*. Sedangkan *Republic of Ireland* menentukan posisinya untuk mendukung IRA untuk lepas dari negara Inggris dan bergabung dengan *Republic of Ireland*.

Selama kurun waktu 30 tahun menghadapi konflik, para pihak yang berkonflik beberapa kali mengupayakan perjanjian damai yang sebagian besar tidak berhasil meredam konflik. Bahkan perdana menteri Inggris secara berturut-turut, yakni mulai dari Churchill, Wilson hingga Thetcher meyakini bahwa konflik Irlandia Utara ini tidak akan pernah redam. Terhitung sebanyak tiga perjanjian yakni Sunningdale Agreement 1973, Anglo-Irish Agreement 1985, dan Downing Street Declaration 1994. (Powell, 2011). Satu-satunya perjanjian yang berhasil meredam konflik adalah perjanjian Belfast Agreement atau yang juga dikenal dengan Good Friday Agreement pada tahun 1998.

Sunningdale Agreement dibentuk oleh pemerintah Inggris dan juga pemerintah Irlandia serta partai-partai Republikan dan unionis yang moderat. Perjanjian ini bertujuan untuk membagi kekuasaan antara unionis dan Republikan dengan mendirikan *Council Of Ireland* sebagai bentuk meningkatkan kerjasama lintas batas. Kegagalan perjanjian ini dikarenakan dua hal, pertama adalah kekukuhan Republikan yang tetap ingin meniadakan negara Irlandia Utara namun hanya satu Irlandia. Alasan kedua yang hampir serupa adalah persepsi unionis yang menganggap pembagian kekuasaan ini hanya akan semakin menegaskan keberadaan kesatuan Irlandia dengan didirikannya *council of Ireland*. Faktor pendukung kegagalan perjanjian ini adalah perpecahan di kubu unionis atas raksi dari *Sunningdale Agreement* 1973.

Reaksi penolakan dari unionis juga mengakibatkan perjanjian *Anglo-Irish Agreement* pada tahun 1985, berujung serangan militer dari kelompok-kelompok paramiliter loyalis seperti Ulster Volunteer Force, Ulster Defense Association and Ulster Resistance yang menyebabkan jumlah korban katholik dan Republikan bertambah. Para unionis ini masih menganggap bahwa hasil dari perjanjian ini memihak Republikan yakni dengan memaksa unionis menyetujui pembagian

kekuasaan, meskipun dalam perjanjian tersebut telah diterangkan bahwa nasib masyarakat Irlandia Utara dapat dilakukan melalui referendum.

Harapan untuk menciptakan perdamaian di Irlandia Utara sedikit menemukan titik terang ketika perumusan *Dowing Street Declaration* tahun 1994. Deklarasi ini dinilai memiliki akseptabilitas yang tinggi karena memasukan pemikiran ideologis dari partai-partai unionis maupun Republikan, baik Inggris juga Republik Irlandia. Dalam deklarasi ini juga mulai dimunculkan upaya gencatan senjata bagi IRA. Namun, butuh waktu yang lama untuk meyakinkan IRA bahwa deklarasi ini adalah *win-win solution* antara unionis dan Republikan. Sehingga pada tahun 1998, George Mitchell selaku ketua *International Body on Decommissioning* memberikan batasan waktu kepada semua pihak berkonflik untuk menuju kesepakatan bersama pada tanggal 9 April 1998 yang kemudian di akhiri dengan persetujuan Belfast Agreement, atau yang lebih dikenal dengan Good Friday Agreement.

Menurut Seamus Mallon, Sunningdale Agreement tahun 1973 memiliki kesamaan dengan Good Friday Agreement, dengan dimensi Irlandia sebagai kerangka dasar politik kedua perjanjian. Namun, sunningdale agreemet hanya mampu bertahan beberapa bulan dan jauh berbeda dengan Good Friday Agreement yang berhasil menjadi kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama 30 tahun ini. (Moran, 2012)

A. Rumusan Masalah

Dari rangkaian konflik yang berkepanjangan dan beberapa perjanjian yang gagal meskipun terdapat kerangka dasar yang serupa, menarik untuk dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perjanjian terakhir, yakni Good Friday Agreement tahun 1998 sehingga menghasilkan kesepakatan dari unionis, Republikan, Inggris maupun Republik Irlandia. Dari

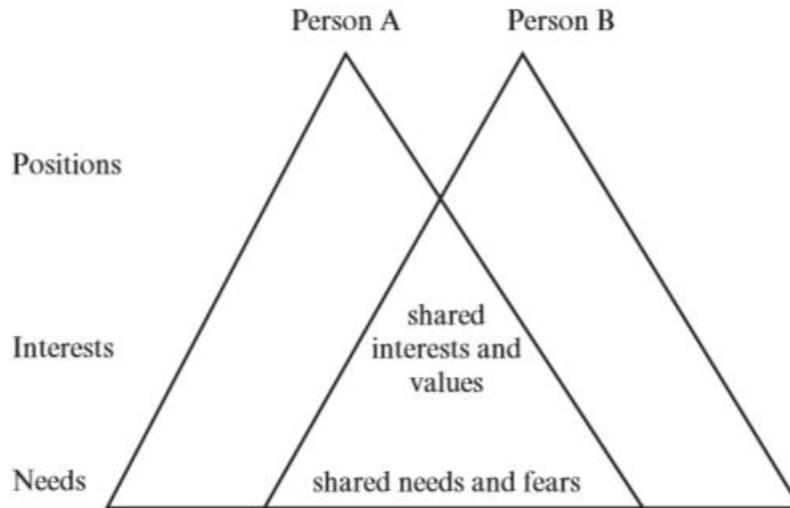
paparan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah: “Mengapa perjanjian damai *Good Friday Agreement* atau *Belfast Agreement* mampu bertahan lebih lama sebagai hasil akhir proses perdamaian konflik di Irlandia Utara?”

B. Landasan Pemikiran

Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi disepakatinya perjanjian damai *Good Friday Agreement* atau *Belfast Agreement*, penulis akan menggunakan pendekatan integrative (*positive-sum*) untuk menelaah konten perjanjian tersebut, khususnya yang menjadi pembeda dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Kemudian, untuk memahami alasan mengapa perjanjian tersebut mampu bertahan dan stabil untuk diaplikasikan sebagai perjanjian damai konflik Irlandia Utara, penulis akan menjelaskannya dengan sistem *stability of consociational settlement*.

A.3 Pendekatan Integrative (*Positive-Sum*)

Untuk menegaskan hasil proses negosiasi, penyelesaian yang baik tidak hanya mampu menjembatani kepentingan yang berseberangan, namun juga merepresentasikan norma dan nilai yang telah menjadi konstruksi sosial. (Ramsbotham, 2005)



Gambar 1. Illustration Position, Interest, Needs by Andrew Floyer Acland

Source: (Ramsbotham, 2005)

Proses negosiasi memang proses yang lamban dan memakan waktu lama. Hasil akhir sebuah negosiasi akan berbeda, tergantung konflik yang ingin diakhiri. Hasil dari sebuah negosiasi dapat dicapai melalui pendekatan *integrative (positive-sum)* atau *bargaining (zero-sum)*.

Pendekatan *integrative* adalah upaya untuk menemukan cara rekonsiliasi, kemudian menemukan kepentingan yang mendasar, nilai, atau kebutuhan. Misalnya, pendekatan *integrative* diupayakan dengan mengatur isu untuk di definisikan lebih luas lagi oleh masing-masing pihak yang berkepentingan agar mendapatkan isi yang sesuai, membagi kedaulatan atau akses untuk mendapatkan sumber daya, meningkatkan ukuran 'kue'. (Ramsbotham, 2005)

Dalam ilustrasi diatas, Floyer Acland ingin menggambarkan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dari pendekatan integrative mengutamakan pembagian kepentingan atau nilai dan kebutuhan dibandingkan dengan posisi, membagi kebutuhan dan kekhawatiran atau keraguan.

“Interest tend to be things which people move towards because they give them pleasure. Needs, on the other hand, tend to be things, the absence of which people try to avoid because it causes pain, on the whole, interest lead while need drive.”
(Acland, 2003)

Pendekatan integrative dilakukan dengan strategi akomodasi. Menurut Floyer Acland, akomodasi merupakan kebalikan dari kompetisi, yaitu suatu bentuk kerjasama namun dengan tidak terlalu percaya diri atau masih terdapat kekhawatiran atau keraguan. Itu artinya mengabaikan kepentingan sendiri dalam usaha untuk memuaskan pihak lain.

Dalam konflik etnik, pendekatan *integrative (positive-sum)* akan tercapai jika *consociationalism, atau federalism, atau autonomy, atau power-sharing*, atau pembubaran kekuasaan dan sistem electoral yang memberikan insentif untuk koalisi inter-etnik digunakan sebagai jalan keluar dalam situasi konflik etnik. (Ramsbotham, 2005)

B.3 Stability of Consociational Settlement

Dibeberapa konflik di negara Eropa yang berlatar belakang konflik etnik, *consociational* menjadi solusi sebagai penyelesaian konflik, seperti konflik di negara Skandinavia, Belanda, Italia, atau Belgia. Termasuk konflik di Irlandia Utara antara Unionis dan Republikan.

Istilah *consociational* dicetuskan pertama kali oleh Arend Lijphart yang kemudian dia uji kembali sebagai bagian dari sistem demokrasi pada tahun 1960-an. Lijphart menyimpulkan bahwa *consociational* memiliki kemungkinan paling adil atau seimbang sebagai penyelesaian untuk konflik etnik. *Consociational* akan disesuaikan dengan substansi yang lebih kompleks yang di

desain untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat. (Wolff, *Disputed Territories: The Transnational Dynamics of Ethnic Conflict Settlement*; First Edition, 2004)

Di negara-negara yang memiliki teritori yang tidak luas dimana *consociational* diaplikasikan, kemudian konsekuensi internal dan eksternal juga berpengaruh sebagaimana yang telah di kompromikan oleh elit politik, maka ditekankan oleh Lijphart bahwa kondisi tersebut akan meningkatkan stabilitas dari penyelesaian *consociational*, inilah yang dijelaskan lebih lanjut oleh Wolff sebagai sistem *stability of consociational settlement*.

Sistem *stability of consociational settlement* akan dipengaruhi oleh : *the dispute territory* (wilayah perselisihan), *the kin-state* (keadaan negara-famili) dalam hal ini adalah masalah identitas dari persepsi Republikan dan Unionis, *the host-state* (keadaan negara-tuan rumah), dan *international context* (konteks internasional). (Wolff)

Setelah tiga perjanjian besar yaitu Sunningdale Agreement, Anglo-Irish Agreement, dan Downing Street Declaration akhirnya perjanjian terakhir disepakati yakni Good Friday Agreement atau Belfast Agreement. Perjanjian *Good Friday Agreement* ditandatangani pada tanggal 10 April 1998. Perjanjian ini dihasilkan setelah semua pihak melakukan perundingan selama kurang lebih lima bulan. Dalam bab ini akan diulas faktor apa yang menjadi pembeda Good Friday Agreement dengan perjanjian lain sehingga mampu menjadi kesepakatan damai terakhir dalam konflik Irlandia Utara. Secara konteks isi perjanjian, Good Friday Agreement lebih komprehensif dibandingkan dengan ketiga perjanjian sebelumnya. Perjanjian ini dapat diterima oleh semua pihak karena mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak yakni *self-determination*, pengakuan identitas dan kerjasama antar pulau. (Wolff)

A. Komprehensifitas Konten Good Friday Agreement

Syarat utama sebuah perjanjian yang komprehensif adalah adanya kesepakatan yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak yakni dengan terlaksananya rekonsiliasi yang terdiri dari semua pihak yang terlibat. (Ramsbotham, 2005) Rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk mendudukan semua pihak yang kemudian dapat memenuhi syarat kedua. Syarat kedua adalah mendapatkan apa yang sebenarnya kepentingan mendasar atau kebutuhan atau nilai yang diinginkan setiap pihak. Solusi yang ditawarkan biasanya berupa membagi kedaulatan atau memperluas isu yang mampu menyentuh setiap pihak (Ramsbotham, 2005) . Untuk menegaskan hasil, Floyer Acland mengatakan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dari pendekatan integrative mengutamakan pembagian kepentingan atau nilai dan kebutuhan dibandingkan megedepankan posisi (Acland, 2003).

Meskipun sempat mengalami kendala di awal persiapan negosiasi namun akhirnya perundingan terakhir mampu mengajak semua pihak untuk duduk bersama untuk membuat kesepakatan damai. Hal ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya yang hanya melibatkan beberapa pihak. George Mitchell sebagai negosiator menghadirkan perwakilan dari masing-masing pihak untuk melakukan diplomasi multi-track. Peserta perundingan adalah Bertie Ahern- Taoiseach (Perdana Menteri Irlandia), David Trimble- Pemimpin UUP, Gerry Adams- Presiden Sinn Féin, John Hume- Pemimpin of SDLP, John Taylor- UUP negosiator, Martin McGuinness- Ketua negosiator Sinn Féin, dan Tony Blair- Perdana Menteri Britania Raya dan Pemimpin Partai Buruh Inggris, dan perwakilan dari Ulster Democratic Party, Progressive Unionist Party, Northern Ireland Women's Coalition dan Alliance Party of Northern Ireland. (Larsson, 2012)

A.1 *Self-Determination* dan Pengakuan Identitas

Seperti perjanjian-perjanjian sebelumnya, pembahasan akan status Irlandia Utara di masa depan selalu kontroversial. Prinsip self-determination dalam perjanjian Good Friday Agreement memiliki kemiripan dengan isi perjanjian Anglo-Irish Agreement yang telah dibahas di bab sebelumnya. Namun, Good Friday Agreement menawarkan keseimbangan penyelesaian secara konstitusional berdasarkan prinsip self-determination (Ahern, 1998). Hal ini termaktub dalam poin (i) dan (ii) dalam perjanjian Good Friday Agreement:

(i) recognise the legitimacy of whatever choice is freely exercised by a majority of the people of Northern Ireland with regard to its status, whether they prefer to continue to support the Union with Great Britain or a sovereign united Ireland;

(ii) recognise that it is for the people of the island of Ireland alone, by agreement between the two parts respectively and without external impediment, to exercise their right of self-determination on the basis of consent, freely and concurrently given, North and South, to bring about a united Ireland, if that is their wish, accepting that this right must be achieved and exercised with and subject to the agreement and consent of a majority of the people of Northern Ireland;

Seperti yang telah diuraikan di Bab II, konflik ini bukanlah sepenuhnya konflik agama, namun berakar dari konflik etnis. Sentimen terhadap etnis lain ini kemudian bergeser pada label agama yang menimbulkan diskriminasi bagi minoritas Katolik di Irlandia Utara. Diskriminasi yang dialami adalah diskriminasi dalam bidang politik dan sosial ekonomi. Sehingga, status akan hak identitas diangkat dalam perjanjian ini pada *Annex: Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Ireland dalam klausul Constitutional Issues* poin (v) dan (vi):

“(v) affirm that whatever choice is freely exercised by a majority of the people of Northern Ireland, the power of the sovereign government with jurisdiction there shall be exercised with rigorous impartiality on behalf of all the people in the diversity of their identities and traditions and shall be founded on the principles of full respect for, and equality of, civil, political, social and cultural rights, of freedom from discrimination for all citizens, and of parity of esteem and of just and equal treatment for the identity, ethos, and aspirations of both communities;

(vi) recognise the birthright of all the people of Northern Ireland to identify themselves and be accepted as Irish or British, or both, as they may so choose, and accordingly confirm that their right to hold both British and Irish citizenship is accepted by both Governments and would not be affected by any future change in the status of Northern Ireland.”(Good Friday Agreement 1998)

Implementasi dari perjanjian ini adalah referendum yang diadakan tanggal 22 Mei 1998 untuk menentukan status Irlandia Utara dan pengakuan atas identitas. Referendum dilakukan di kedua tempat yakni Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Untuk masyarakat di Irlandia Utara, akan diberikan pertanyaan berikut: *“Do you support the Agreement reached at the multi-party talks on Northern Ireland and set out in Command Paper 3883?”* Sebanyak 676,966 atau 71,1 % menyatakan setuju terhadap isi perjanjian ini dan 274,879 atau 28,9 % menolak. Sedangkan di Republik Irlandia, masyarakat akan ditanyakan persetujuannya atas isi perjanjian Good Friday Agreement dengan mengajukan pertanyaan berikut: *“Do you approve of the proposal to amend the Constitution contained in the under mentioned Bill, Nineteenth Amendment of the Constitution Bill, 1998?”* Hasilnya, sebanyak 1,442,583 atau 94,4% menyatakan setuju atas perjanjian tersebut dan 85,748 atau 5,6% sisanya menolak. Maka berdasarkan hasil referendum ini, Irlandia Utara tetap bergabung dengan Britania Raya (<https://peaceaccords.nd.edu/provision/right-self-determination-northern-ireland-good-friday-agreement>, diakses tanggal 16 April 2017)

A.2 Kerjasama Antar Pulau

Perjanjian kerjasama antar pulau memiliki kemiripan dengan perjanjian Sunningdale Agreement. Jika dalam perjanjian Sunningdale Agreement membahas tentang power-sharing dengan pembentukan Council of Ireland, maka berbeda dengan perjanjian Good Friday Agreement yang tidak hanya “membagi kue” namun memperbesar “ukuran kue”. Pembagian kekuasaan dalam konstitusi tidak hanya melibatkan Irlandia utara dan Republik Irlandia. Perjanjian Good Friday

Agreement menguatkan hubungan utara-selatan, dan barat-timur, seperti yang dijelaskan Perdana Menteri Irlandia Utara Bertie Ahern dalam jurnalnya, *The Good Friday Agreement 1998: An Overview*: “*The agreement provides for a new beginning-based on partnership and co-operation – in relationship within Northern Ireland, between North-South in Ireland and between Ireland and Britain*” (Ahern, 1998).

Kerjasama antar pulau terdapat pada *strand 2* dan *strand 3* perjanjian *Good Friday Agreement*. Pada *strand 2*, menjelaskan tentang pembentukan *North-South Ministerial Council (NSMC)*. Dewan kementerian ini akan memperkuat hubungan antara Inggris dan Irlandia:

“1. Under a new British/Irish Agreement dealing with the totality of relationships, and related legislation at Westminster and in the Oireachtas, a North/South Ministerial Council to be established to bring together

those with executive responsibilities in Northern Ireland and the Irish Government, to develop consultation, co-operation and action within the island of Ireland - including through implementation on an all-island and cross-border basis - on matters of mutual interest within the competence of the Administrations, North and South.

2. All Council decisions to be by agreement between the two sides. Northern Ireland to be represented by the First Minister, Deputy First Minister and any relevant Ministers, the Irish Government by the Taoiseach and relevant Ministers, all operating in accordance with the rules for democratic authority and accountability in force in the Northern Ireland Assembly and the Oireachtas respectively. Participation in the Council to be one of the essential responsibilities attaching to relevant posts in the two Administrations. If a holder of a relevant post will not participate normally in the Council, the Taoiseach in the case of the Irish Government and the First and Deputy First Minister in the case of the Northern Ireland Administration to be able to make alternative arrangements.” (Good Friday Agreement 1998)

Poin nomor dua pada *strand dua* menjelaskan bahwa semua keputusan dewan merupakan kesepakatan antara Irlandia Utara yang diwakili oleh Menteri Pertama Irlandia Utara. Implementasi dari poin ini kemudian memilih David Trimble sebagai Menteri Pertama Irlandia Utara.

Strand tiga mengatur tentang Dewan Inggris-Irlandia (*British-Irish Council (BIC)*) dan Konferensi Intergovernmental Inggris-Irlandia yang membahas tentang pembentukan Dewan Inggris-Irlandia dibawah *British-Irish Agreement* untuk menjaga keharmonisan dan pembangunan yang saling menguntungkan bagi hubungan masyarakat kedua negara. Anggota BIC terdiri dari perwakilan Pemerintah Inggris dan Irlandia:

“1. A British-Irish Council (BIC) will be established under a new British- Irish Agreement to promote the harmonious and mutually beneficial development of the totality of relationships among the peoples of these islands.

2. Membership of the BIC will comprise representatives of the British and Irish Governments, devolved institutions in Northern Ireland, Scotland and Wales, when established, and, if appropriate, elsewhere in the United Kingdom, together with representatives of the Isle of Man and the Channel Islands”

Pada *strand* ini juga menjelaskan mengenai Konferensi Intergovernmental Inggris-Irlandia yang memperbaharui hubungan antara kedua negara tersebut konferensi ini akan mempromosikan hubungan bilateral kedua negara dalam segala kepentingan yang saling menguntungkan termasuk mengenai hak asasi, perlingungan, dan kesamaan dalam memperoleh kesempatan, keamanan,, menjaga ketertiban dan keadilan, tahanan perang, validasi, implementasi dan peninjauan:

“1. There will be a new British-Irish Agreement dealing with the totality of relationships. It will establish a standing British-Irish Intergovernmental Conference, which will subsume both the Anglo-Irish Intergovernmental Council and the Intergovernmental Conference established under the 1985 Agreement.

2. The Conference will bring together the British and Irish Governments to promote bilateral co-operation at all levels on all matters of mutual interest within the competence of both Governments.

It also contained sections on rights, safeguards, and equality of opportunity; decommissioning; security; policing and justice; prisoners; and validation, implementation and review”. (Good Friday Agreement 1998)

Disepakatinya Good Friday Agreement dipengaruhi beberapa faktor-faktor yang termuat dalam konten. Hal inilah yang menjadi pembeda Good Friday Agreement dan perjanjian

sebelumnya. Faktor pertama adalah adanya rekonsiliasi semua pihak yang terlibat konflik dalam perundingan dan faktor kedua, konten perjanjian yang komprehensif yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Faktor pertama, yakni rekonsiliasi menjadi alasan kuat kesuksesan perjanjian ini. Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian ini termasuk IRA dan Sinn Fein bergabung dalam negosiasi. Akhirnya, Good Friday Agreement ditandatangani oleh para peserta perundingan yakni: Bertie Ahern- Taoiseach (Perdana Menteri Irlandia), David Trimble- Pemimpin UUP, Gerry Adams- Presiden Sinn Féin, John Hume- Pemimpin of SDLP, John Taylor- UUP negosiator, Martin McGuinness- Ketua negosiator Sinn Féin, dan Tony Blair- Perdana Menteri Britania Raya dan Pemimpin Partai Buruh Inggris, dan perwakilan dari Ulster Democratic Party, Progressive Unionist Party, Northern Ireland Women's Coalition dan Alliance Party of Northern Ireland

Faktor kedua adalah konten perjanjian yang komprehensif. Terdapat tiga pokok penting yang terdapat dalam perjanjian Good Friday Agreement sehingga mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, yakni *self-determination*, pengakuan identitas, dan kerjasama antar pulau. Self-determination dan pengakuan identitas terdapat dalam Annex: Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Ireland dalam klausul Constitutional Issues poin (v) dan (vi). Konten ini sangat penting mengingat konflik ini merupakan konflik identitas dimana sentiment akan identitas tersebut membawa diskriminasi dalam bidang politik, dan sosial ekonomi di Irlandia Utara. Kerjasama antar pulau terdapat dalam strand 2 dan strand 3 perjanjian Good Friday Agreement. Berbeda dengan Anglo-Irish Agreement yang hanya memuat kerjasama antara Inggris dan Irlandia tanpa melibatkan Unonis, dalam perjanjian ini kerjasama diperluas yakni utara-selatan dan barat-timur dengan pembentukan NSMC dan BIC.

Kestabilan Good Friday Agreement lebih kuat dibanding dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya yang hanya bertahan rata-rata setahun. Hal ini karena adanya faktor hubungan host, kin state, dispute territory, dan pengaruh dari international context. Keadaan di Irlandia Utara sebagai host-state dan dispute territory cenderung kondusif dibanding ketika perundingan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya. Hal ini karena adanya kepatuhan semua pihak akan Mitchell Principle, khususnya IRA dan Sinn Fein.

Good Friday Agreement juga disahkan oleh electoral di Irlandia dan Irlandia Utara sebagai kin-state melalui referendum pada tanggal 22 Mei 1998. Sehingga timbul kesan memiliki perjanjian ini. berbeda dengan perjanjian sebelumnya terutama Sunningdale yang memiliki kemiripan dengan konten Good Friday Agreement. Sunningdale Agreement hanya disepakati oleh Council of Ireland yang jelas ditentang pembentukannya oleh Unionis maupun Loyalist.

Dalam konteks internasional, adanya *intergovernmental institution* akan mengontrol dan menekan kelompok masing-masing baik bagi Inggris maupun Irlandia sehingga akan lebih fleksibel dalam menggunakan pendekatan yang bersifat mendamaikan untuk mengakomodasi kelompok Unionis. Pengaruh Bill Clinton sebagai Presiden Amerika Serikat saat itu sangat berpengaruh bagi proses perjanjian ini. dengan mengutus George Mitchell sebagai Special Envoy of Northern Ireland Conflict, Mitchell berhasil mewujudkan terciptanya perdamaian di Irlandia utara sebagai ketua negosiasi.

Faktor konteks internasional lain yang mendukung stabilitas perjanjian ini adalah penganugerahan Nobel Perjanjian untuk David Trimble dan John Hume pada tahun 1999. Dengan adanya penganugerahan ini akan memberikan tanggung jawab lebih bagi mereka untuk menjaga stabilitas Good Friday Agreement.